

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya air minum mutlak harus tersedia dalam kuantitas (jumlah) dan kualitas yang memadai. Air dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan air untuk keperluan individu berbeda-beda untuk tiap tempat dan tiap tingkatan kebutuhan. Semakin tinggi taraf kehidupan di suatu tempat, maka semakin meningkat pula sejumlah kebutuhan akan air. Pemakaian air sangat luas, sehingga harus diupayakan sedemikian rupa agar tetap tersedia dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu baik fisik, biologi maupun kimia (Alwi, 2012;40).

Pada hakikatnya, alam telah menyediakan air minum yang telah dibutuhkan. Namun demikian, desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Air yang ada terganggu jumlah dan kualitasnya sehingga tidak lagi layak dikonsumsi secara langsung. Diperlukan prasarana dan sarana air minum untuk merekayasa agar air yang disediakan alam dapat aman dan sehat dikonsumsi.

Seperti halnya di Kabupaten Tulungagung, dimana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat membentuk suatu sinergi dalam upaya pembangunan SPAM dengan mendukung terwujudnya 100% akses universal air minum pada tahun-tahun yang akan datang, serta kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan SPAM dan permasalahan air minum dalam rangka pencapaian sasaran dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan Standar Pelayanan Minimum (Permen PU No: 14/PRT/M/2010).

Akan tetapi untuk pendanaan proyek tersebut dalam setiap tahunnya tidak menentu jumlahnya dan bahkan masih sangat terbatas.

Ini merupakan salah satu tantangan terberat dalam persoalan infrastruktur di Kabupaten Tulungagung, dimana anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan cukup besar akan tetapi minim dana yang tersedia. Pada Tahun 2019 usulan dana pembangunan SPAM secara keseluruhan sebesar 10,5 milyar rupiah, Sementara alokasi anggaran untuk program pembangunan tersebut turunnya anggaran hanya sekitar 20% dari keseluruhan anggaran yang diharapkan. Artinya itu hanya sekitar 2,1 milyar rupiah yang dipastikan bisa didapat. Oleh karena itu dapat terlihat jumlah desa yang akan ditangani tidak seimbang dengan dana yang tersedia. Maka perlu adanya prioritas pemilihan atau penentuan pembangunan SPAM Perdesaan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia. Pemilihan ini tentunya membutuhkan aspek, kriteria dan cara yang tepat supaya kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangannya penentuan urutan prioritas pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung dilakukan berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan usulan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari tingkat desa, kecamatan sampai menjadi rancangan akhir dan pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang selanjutnya meningkat pada forum pembahasan dan penyepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD) serta pembahasan Prioritas dan Plafon APBD bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Selanjutnya penentuan prioritas tersebut juga ada yang melalui proposal usulan langsung dari masing-masing wilayah mulai dari tingkat Desa hingga Kecamatan kepada Bupati maupun dinas teknis terkait dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung dengan kriteria-kriteria : anggaran dan teknis. Dalam kaitannya kriteria-kriteria tersebut mempengaruhi urutan prioritas dan belum melalui suatu metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, meskipun sebelumnya tahapan perencanaan jangka panjang, jangka

menengah, dan jangka pendek dalam pembangunan penyediaan air minum di Kabupaten Tulungagung telah dituangkan dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015, serta penyediaan air minum khususnya perpipaan di Kabupaten Tulungagung telah dikembangkan dengan menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat sektoral maupun pendekatan keterpaduan dan kewilayahan perkotaan/perdesaan yang dirangkum dalam sebuah kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) pengembangan SPAM untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2016), namun dalam penentuan urutan skala prioritas pembangunan SPAM Perdesaan Kabupaten Tulungagung tersebut masih menjadi perdebatan secara luas.

Perdebatan secara luas umumnya terpusat pada alternatif yang harus dipilih, karena banyak pihak yang berkepentingan terpilihnya suatu alternatif dan bukan pada aspek apa dan kriteria apa yang menentukan terpilihnya suatu alternatif, tentunya dari berbagai aspek dan kriteria yang ada tentunya mempunyai bobot kepentingan yang berbeda. Oleh karenanya penting penentuan bobot aspek dan kriteria yang sesuai dengan keinginan stakeholder. Selanjutnya penentuan bobot aspek dan kriteria yang harus ada dalam proses pemilihan alternatif adalah proses penilaian antar alternatif dari semua stakeholder atas aspek dan kriteria yang menjadi pertimbangan. Pemilihan alternative dengan beberapa kriteria dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain dengan metode-metode Dominance, Feasible Ranges, Lexicography, Effectiveness Index, ataupun Analytical Hierarchy Process (De Garmo dkk, 1984). Setiap metode mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing, dan pemilihan metode yang akan diterapkan hendaknya disesuaikan dengan permasalahan yang akan ditangani.

Oleh karena itu, sangat penting dilakukan penelitian untuk mendapatkan cara yang tepat agar pengambilan keputusan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum itu dapat dipertanggungjawabkan dan disesuaikan dengan dana yang ada. Semua aspek dan kriteria yang ada diperlakukan secara adil sesuai dengan kepentingan masing-masing, untuk itu penggalan aspek dan kriteria yang dipakai dalam penelitian ini dapat mendukung pemilihan alternatif-alternatif

yang akan ditentukan prioritasnya, salah satu metode dalam penentuan pemilihan prioritas dan urutan alternatif-alternatif adalah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang diperkirakan paling sesuai untuk diterapkan mengingat Sistem Penyediaan Air Minum merupakan salah satu fasilitas untuk kepentingan umum serta sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai penerapan metode AHP untuk penentuan alternatif pemilihan pembangunan system penyediaan air minum perdesaan di kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini merupakan salah satu wujud pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dengan harapan agar menjadi inspirasi pengambil kebijakan dalam menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, untuk masa mendatang apabila sistem penganggaran mempergunakan *e-planning* dan *e-budgetting*, keputusan/kebijakan yang diambil untuk merencanakan kegiatan merupakan keputusan/kebijakan yang tepat.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat teridentifikasi masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Kebutuhan dana anggaran untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tidak sebanding dengan jumlah dana yang tersedia.
2. Permintaan atau kebutuhan air minum oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung yang selalu meningkat.
3. Belum ada metode yang tepat dalam pengambilan keputusan untuk pemilihan alternatif pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan dana yang tersedia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian yang terkait dengan metode AHP dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapakah bobot dari masing-masing aspek dan kriteria yang dipertimbangkan dalam penentuan alternatif pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimanakah urutan ranking alternatif pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimanakah urutan prioritas pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pembangunan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis besarnya bobot aspek dan bobot kriteria yang dipertimbangkan dalam penentuan alternatif pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis urutan ranking alternatif pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung.
3. Menganalisis urutan prioritas pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pembangunan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dalam pengambilan keputusan secara teknis dan rasional untuk menentukan urutan prioritas pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan dana yang tersedia.
2. Sebagai bahan masukan pada pelaksana-pelaksana dilapangan dalam penentuan lokasi kegiatan pekerjaan pembangunan Sistem Penyediaan Air

Minum secara cermat, sehingga dengan biaya yang telah dikeluarkan dapat mencapai sasaran sesuai yang diharapkan.

3. Sebagai acuan dalam penentuan prioritas, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum mana saja yang akan dibangun dengan keterbatasan dana yang tersedia.
4. Sebagai instrumen penyusunan naskah akademis bersama DPRD dalam pembuatan regulasi Peraturan Daerah tentang penyediaan air minum Kabupaten Tulungagung.
5. Dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam penentuan prioritas kebijakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung.

1.6 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini hanya dibatasi sebagai berikut :

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan yang akan diteliti adalah SPAM Perdesaan dengan jaringan perpipaan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Studi hanya dilakukan pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung, yaitu, Desa Jengglunharjo, Desa Pucanglaban, Desa Talang, Desa Keboireng, Desa Tugu dan Desa Gondanggunung.
3. Metode Analisa penelitian menggunakan metode *Analitycal Hyrarchie Procces* (AHP).